

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020



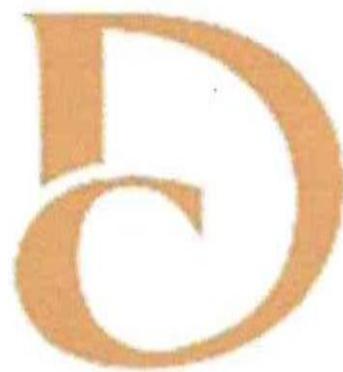
PT. BPR DANA KARYA NUSA

**Jl. By Pas Ir. Soekarno, Br. Dinas Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri,
Tabanan, Bali Telp. 0361.7993334, HP: 085333866326**

email : bpr.danakaryanusa@gmail.com

**email Whistleblowing System :
wbs.danakaryanusa@gmail.com**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA



**PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. Dalam dunia perbankan, Penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan Perusahaan.

1. PENGERTIAN UMUM

Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelola usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, misi, rencana strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi

2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja PT. BPR Dana Karya Nusa
- Melindungi kepentingan *stakeholders* PT. BPR Dana Karya Nusa
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan PT. BPR Dana Karya Nusa terhadap peraturan perundang-undangan

3. KOMITMEN PT. BPR DANA KARYA NUSA DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. PT. BPR Dana Karya Nusa telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Dana Karya Nusa menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan PT. BPR Dana Karya Nusa.
2. PT. BPR Dana Karya Nusa berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Dana Karya Nusa dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing tinggi.
3. PT. BPR Dana Karya Nusa juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Dana

Karya Nusa sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten keberadaan BPR.

4. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN OLEH PT. BPR DANA KARYA NUSA

Sebagai Lembaga jasa keuangan yang menjadi kepercayaan masyarakat PT. BPR Dana Karya Nusa dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu: keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

➤ Keterbukaan (*Transparency*)

- Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut .

➤ Akuntabilitas (*Accountability*)

Bank harus menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing sumberdaya manusia yang ada dalam perusahaan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha dan tujuan perusahaan.

➤ Pertanggungjawaban (*responsibility*)

- Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berprinsip pada prinsip kehati-hatian.
- Bank harus bertindak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Independensi (*Independency*)

- Pengelola bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
- Bank menghindari terjadi dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*.
- Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan pihak manapun.

➤ Kewajaran (*Fairness*)

- Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*)
- Bank harus memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

5. PRINSIP PENERAPAN GCG DI PT. BPR DANA KARYA NUSA

Prinsip penerapan GCG di PT. BPR Dana Karya Nusa Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/IPJOK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan pada 5 prinsip Dasar Tata Kelola

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020

Perusahaan yang meliputi: *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Akuntability)*, *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, *Independensi (Independency)* dan *Kewajaran (Fairness)*

II. STRUKTUR TATA KELOLA PT. BPR DANA KARYA NUSA

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Dana Karya Nusa telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data Per 31 Desember 2020, posisi asset PT. BPR Dana Karya Nusa yang beralamat di Jalan Bypass Ir Soekarno Banjar Anyar Kediri Tabanan Bali sebesar Rp. 16.994.664.538,54,- dengan Modal Inti sebesar Rp.8.139.391.243,83,-Adapun struktur tata kelola PT. BPR Dana Karya Nusa Berdasarkan asset dan modal inti dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. BPR DANA KARYA NUSA

Direksi PT. BPR Dana Karya Nusa Melalui RUPS tertanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 01 pada Notaris Komang Agus Wira Kusuma, SH., M.Kn, susunan Direksi Per 03 November 2020 sebagai berikut:

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Eko Budi Handoyo</p> <hr/> <p>NIK : DKN001</p> <hr/> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas Dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BPR dalam mencapai maksud dan tujuannya. • Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR, pedoman dan tata tertib kerja direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK. • Direksi Wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. • Anggota direksi wajib mengikuti setiap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. • Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggungrenteng atas kerugian BPR yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. • Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya. • Direksi wajib membentuk Pejabat Eksekutif (Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan). • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK atau Otoritas lainnya.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. • Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dekom. • Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota direksi.
2	<p>Nama : I Nengah Suarta</p> <p>NIK : DKN007</p> <p>Jabatan : Direktur</p>
	<p>Tugas Dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BPR dalam mencapai maksud dan tujuannya. • Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR, pedoman dan tata tertib kerja direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK. • Direksi Wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. • Anggota direksi wajib mengikuti setiap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. • Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggungrenteng atas kerugian BPR yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. • Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya. • Direksi wajib membentuk Pejabat Eksekutif (Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan). • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK atau Otoritas lainnya. • Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. • Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dekom. • Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota direksi.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p>

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PT. BPR DANA KARYA NUSA

Dewan Komisaris PT. BPR Dana Karya Nusa Melalui RUPS tertanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 01 pada Notaris Komang Agus Wira Kusuma, S.H., M.Kn, susunan Dewan Komisaris Per 03 November 2020 sebagai berikut:

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : Stevan Adri Santoso</p> <hr/> <p>NIK : DKN011</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas Dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. • Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. • Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. • Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
2	<p>Nama : I Ketut Sudarsa</p> <hr/> <p>NIK : DKN008</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas Dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Melaksanakan pengawasn terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. • Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. • Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran peraturan prundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR
Tindak Lanjut Rekomendasi Direksi :	

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Selama satu periode Desember 2020 BPR belum memiliki komite Audit, Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

NO	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: NIHIL
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: NIHIL
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: NIHIL

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	NIHIL						

c. Program Kerja Dan Realisasi Program Kerja Komite

NO	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : NIHIL
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : NIHIL
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : NIHIL
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

4. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI PT BPR DANA KARYA NUSA

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Seluruh Anggota Direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan Saham pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Eko Budi Handoyo	DKN001	NIHIL	NIHIL
2	I Nengah Suarta	DKN007	NIHIL	NIHIL

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
Seluruh Anggota Direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain.

5.

NO	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Eko Budi Handoyo	DKN001	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	I Nengah Suarta	DKN007	NIHIL	NIHIL	NIHIL

HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT BPR DANA KARYA NUSA

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
Seluruh Anggota Direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris dan/atau pemegang saham BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eko Budi Handoyo	DKN001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Nengah Suarta	DKN007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
Seluruh Anggota Direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris dan/atau pemegang saham BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eko Budi Handoyo	DKN001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Nengah Suarta	DKN007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

6. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS PT BPR DANA KARYA NUSA

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan Saham pada BPR

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Stevan Adri Santoso	DKN011	NIHIL	NIHIL
2	I Ketut Sudarsa	DKN008	NIHIL	NIHIL

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain.

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Stevan Adri Santoso	DKN011	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	I Ketut Sudarsa	DKN008	NIHIL	NIHIL	NIHIL

7. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR DANA KARYA NUSA

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris dan/atau pemegang saham BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Stevan Adri Santoso	DKN011	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Ketut Sudarsa	DKN008	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris dan/atau pemegang saham BPR

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Stevan Adri Santoso	DKN011	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Ketut Sudarsa	DKN008	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

8. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. BPR DANA KARYA NUSA YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS.

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS:

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Nominal (Rp.)	Jumlah Orang	Nominal (Rp.)
1	Gaji	2	264.000.000	2	144.000.000
2	Tunjangan	2	22.000.000	2	12.000.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi bagi pengurus PT. BPR Dana Karya Nusa yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas wewenang, tanggungjawab, dan resiko dari masing – masing anggota Direksi dan dewan Komisaris	-	-	-	-
Total			286.000.000		156.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	Mobil, BBM, Service, Asuransi TLO/ 2 unit (Baru ada 1 unit)	-
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan/ 2 unit, BPJS Ketenagakerjaan/ 2 unit	BPJS Kesehatan/ 2 unit, BPJS Ketenagakerjaan/ 2 unit
4.	Fasilitas Lainnya	Asuransi Pensiun (DPLK) /2 unit Tunjangan Pajak PPH21/2 unit Biaya Perjalanan Dinas/Perdiem (BPD)/2 unit Perpanjangan	Asuransi Pensiun (DPLK) /2 unit Tunjangan Pajak PPH21/2 unit Biaya Perjalanan Dinas/Perdiem (BPD)/2 unit Perpanjangan

9. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH DI PT. BPR DANA KARYA NUSA

Rasio Gaji tertinggi dan Gaji terendah yaitu:

1. Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya selama 1 (satu) tahun;
2. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah, dalam perbandingan:
 - Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah
 - Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah
 - Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji Dewan Komisaris yang terendah
 - Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi
 - Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi

Uraian	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.44 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.86 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.6 : 1

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

10. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS PT BPR DANA KARYA NUSA

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1.	11 Maret 2020	4 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis BPR 2. Isu-isu Strategi BPR 3. Evaluasi, Penetapan Kebijakan Dan Strategi 4. Evaluasi Realisasi RBB Th 2019
2.	3 Juni 2020	4 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan ke PS dibuat yang simple 2. DPK yang baru untuk suport Droping (APEC BPD, Oke Bank atau bank Lainnya) 3. DPK meminta ke PS adalah alternatif terakhir 4. Evaluasi, Penetapan Kebijakan Dan Strategi
3.	8 Sept 2020	4 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan audit OJK Online 2. Persiapan penunjukan KAP untuk audit Tahun 2020 3. Evaluasi, Penetapan Kebijakan Dan Strategi
4.	10 Des 2020	4 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RBB Tahun 2021 2. Pembuatan SOP disesuaikan Ketentuan baru 3. Evaluasi, Penetapan Kebijakan Dan Strategi

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

N	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Tele konferensi	
1.	Stevan Adri Santoso	DKN011	1	3	100%
2.	I Ketut Sudarsa	DKN008	4	0	100%

Keterangan: Tingkat Kehadiran =

$$\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$$

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

11. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) DI PT BPR DANA KARYA NUSA

Selama periode Desember 2020 tidak ada kasus penyimpangan internal baik yang dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai tetap ataupun tidak tetap.

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah diselesaikan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dalam Proses Penyelesaian (termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belum diupayakan penyelesaiannya (merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

12. PERMASALAHAN HUKUM BAIK HUKUM PERDATA MAUPUN HUKUM PIDANA YANG DIHADAPI BPR DANA KARYA NUSA SELAMA PERIODE 2020 DAN TELAH DIAJUKAN MELALUI PROSES HUKUM SERTA UPAYA PENYELESAIAN

Selama periode Desember 2020 PT BPR DANA KARYA NUSA tidak pernah mengalami permasalahan hukum baik perdata atau pidana.

Permasalahan Hukum	(Jumlah Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak ada permasalahan hukum	
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak ada permasalahan hukum	
Total		

13. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT. BPR Dana Karya Nusa atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

14. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK PADA TAHUN LAPORAN 2020

Secara garis besar, program kegiatan sosial PT. BPR Dana Karya Nusa selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

III. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI SELF ASSESSMENT TATA KELOLA PT BPR DANA KARYA NUSA POSISI AKHIR DESEMBER 2020

No	Faktor	Bobot	Penilaian	Nilai Faktor Akhir	Catatan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	2	0,43	Sudah ada Direksi yang bertanggung jawab sebagai Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan masih dalam proses pengajuan di OJK dan akan terealisasi 2021
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	2	0,33	Komisaris sudah melakukan pengawasan
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10%	0	0	Modal inti kurang dari 50 Milyar
4.	Penanganan benturan kepentingan	10%	3	0,25	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2020, tetapi BPR masih belum memiliki SOP Benturan Kepentingan
5.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	10%	3	0,28	BPR belum memiliki PE Kepatuhan
6.	Penerapan fungsi audit intern	10%	3	0,27	BPR belum memiliki PE Audit Internal dan akan terealisasi 2021
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5%	2	0,05	Sudah dilakukan Mou Bank dengan KAP untuk kemudian persetujuan Audit oleh Dewan Komisaris serta BPR melaporkan hasil KAP dan

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN LAPORAN 2020**

					management letter kepada OJK
8.	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10%	3	0,30	BPR Belum memiliki PE Manajemen Risiko
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,50	2	0,15	Tidak terdapat pelanggaran BMPK di tahun 2020
10	Rencana Strategis BPR	7.5%	2	0,15	Rencana Bisnis Bank di tahun 2020 sudah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Disupport oleh Pemegang saham
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7.5%	2	0,15	Bank menyampaikan informasi secara transparan dan saat ini corebanking system BPR Sudah berbentuk IBS sehingga laporan yang diterima bersifat tepat dan realtime.
	NILAI KOMPOSIT	100,00		2,36	

IV. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* POSISI AKHIR

DESEMBER 2020

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Tata Kelola Bagi BPR (Good Corporate Governance)* posisi akhir Desember 2020, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Hasil perhitungan nilai komposit mencapai sebesar 2,36 masih berada pada *range* nilai komposit $1.5 \leq \text{nilai komposit} < 2.5$ sehingga predikat komposit adalah "Baik".

2. Peringkat masing-masing Faktor

No	Faktor	Peringkat
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0
4	Penanganan benturan kepentingan	3
5	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	3
6	Penerapan fungsi audit intern	3
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	3
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2
10	Rencana Strategis BPR	2
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	2

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR DANA KARYA NUSA

TAHUN LAPORAN 2020

3. Kelemahan dan penyebabnya

Terdapat kelemahan khususnya dalam penerapan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dimana sampai dengan akhir Desember 2020 BPR belum mendapatkan kandidat Pejabat Eksekutif di masing- masing fungsi tersebut. Secara umum fungsi dari masing- masing Pejabat Eksekutif tersebut masih belum optimal tetapi dikarenakan BPR sudah memiliki Kebijakan dan Ketentuan (SOP) tentang Audit Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko sehingga BPR dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran yang bersifat Fraud.

4. Kekuatan dan Rencana Tindak lanjut (Action Plan)

- Dengan ini BPR berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.
- BPR juga akan segera melengkapi Pejabat Eksekutif dari masing-masing fungsi Audit Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar penerapan tata kelola BPR Dana Karya Nusa dapat berjalan lebih optimal di Tahun 2021.

Tabanan, 21 April 2021


Eko Budi Handoyo
Direktur Utama



Steven Adri Santoso
Komisaris Utama

Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan